

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C. S. T. Kancil. 2003. *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradna Paramita.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Pradjudi Atmosudirdjo M. S. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- P. M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika
- Ridwan H. R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto E. dan S. Sulartiningrum. 1996. *Pengantar akomodasi dan restoran: Untuk anda yang berkecimpung dalam industri pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- W. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Yudi Setiawan, Boedi D. H., & Imam Ropii. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Yudi Setiawan. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*. Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

## **C. Jurnal**

Andri Yuna Ginting. 2018. *Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*. jurnal usu.ac.id.

Bakhir Muhammad. 2021. *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Nalar Keadilan Vol. 1 (2).

Erni dan Febri Jaya. 2022. *Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*. Wajah Hukum Vol. 6 (2).

Ivan Fauzani Raharja. (2014). *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 (2).

Rahmanisa Anggraeni. 2021. *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 (1).

Sri Nur Hari Susanto. 2019. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Vol. 2 (1).

Wicipto Setiadi. 2009. *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Legalisasi Indonesia Vol. 6 (4).

#### D. Website

<https://dpmpstps.sijunjung.go.id/>

<https://www.easybiz.id/langkah-mudah-penerbitan-perizinan-berusaha-risiko-rendah>

<https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-6-2021-perizinan-berusaha-daerah>

